

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DANA DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN BABADAN PONOROGO

'Uliyatul Mukaromah
IAIN Ponorogo
liamukaromah336@gmail.com

Abstract: *Financial problems are a fairly basic problem in educational institutions. Because all components of education in Islamic boarding schools are closely related to the financial components of pesantren. Financial problems will directly affect the quality of the pesantren. So to meet the costs, a qualified source of funds is needed. This study aims to determine where the source of funds, the allocation of funds and budget planning at PPTQ Al-Hasan Babadan Ponorogo. The method used is a qualitative method with a case study approach. Educational financial management is a series of activities to regulate the financial management of educational institutions starting from planning, accounting, spending, supervision and financial accountability of educational institutions. The core activities in educational financial management can be grouped into three things, namely: budgeting (budgeting), bookkeeping (accounting), auditing (auditing). Mulyasa explained about things that need to be considered in budgeting education costs. First, the budget must be able to replace some ineffective regulations and procedures according to educational needs; Second, revise regulations and other relevant inputs, by developing effective system planning; and Third, monitor and evaluate the output of financing continuously and continuously as a material for planning the next year's budgeting stage. In PPTQ Al-Hasan found the fact that the Al-Hasan cottage is a salafiyah-based cottage where financial arrangements are directly held by the caretaker and assisted by the administrator. For the source of funds at the Al-Hasan boarding school, most of them come from students or guardians of students, besides that there are also people from the community around the lodge and alumni.*

Keywords: *financing management, sources of funds, PPTQ Al-Hasan Ponorogo*

Abstrak: *Problematika keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di lembaga pendidikan. Karena seluruh komponen pendidikan di pesantren erat kaitannya dengan komponen keuangan pesantren. Masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pesantren.. Maka untuk memenuhi biaya diperlukan sumber dana yang mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari mana sumber dana, alokasi dananya dan perencanaan anggaran di PPTQ Al-Hasan Babadan Ponorogo. Metode yang digunakan adalah ketode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Manajemen keuangan pendidikan merupakan sebagai rangkaian aktivitas mengatur mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Adapun kegiatan inti yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (auditing). Mulyasa menjelaskan tentang hal-hayang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan. Pertama, anggaran belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan; Kedua, merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif; dan Ketiga, memonitor dan menilai keluaran pembiayaan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap penggaran tahun berikutnya. Di PPTQ Al-Hasan ditemukan fakta bahwa pondok Al-Hasan merupakan*

pondok yang berbasis salafiyah yang mana pengaturan keuangan langsung dipegang oleh pihak pengasuh dan dibantu oleh pengurus. Untuk sumber dana di pondok Al-Hasan sebagian besar berasal dari santri atau wali santri, selain itu juga ada dan masyarakat baik masyarakat sekitar pondok maupun alumni.

Kata kunci : manajemen pembiayaan, sumber dana, PPTQ Al-Hasan Ponorogo

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan dapat diartikan kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di lembaga pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan terdapat 3 pernyataan terkait seperti yang dikemukakan oleh Thomas John yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan.¹ Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

The Six's M yang menjadi objek pengelolaan manajemen dapat juga diterapkan pada lembaga pendidikan. keenam objek tersebut adalah : *man* (manusia), *money* (dana/uang), *material* (bahan-bahan), *machine* (mesin/peralatan proses), *method* (cara memproses), dan *market* (pasar/konsumen). Dari keenam unsur tersebut salah satu yang paling penting, baik dalam lembaga bisnis maupun lembaga pendidikan adalah masalah uang/dana. Adalah tidak mungkin lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa ada ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatannya dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan kajian mengenai pendanaan/ pembiayaan pendidikan menduduki posisi penting sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan/manajemen dana/keuangan dalam lembaga pendidikan.²

Berbagai hal dilakukan untuk mencapai tujuan Pendidikan dengan baik dalam suatu Lembaga. Maka hal penting yang dilakukan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses tidak akan berjalan sesuai harapan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak

¹ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 1.

² Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 286-287.

mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan Pendidikan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan Pondok pesantren.³

Pondok pesantren sebagai suatu Lembaga Pendidikan maka sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan system. Dalam hal ini system yang dimaksud bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pondok pesantren saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen pembiayaan operasional pesantren merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan pesantren untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren, sistem pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang sangat menentukan dalam pelaksanaan proses pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.⁴

Dalam dunia pendidikan pesantren juga termasuk lembaga pendidikan, namun masuk kedalam golongan lembaga pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Oleh Abu Ahmadi dijelaskan lembaga pendidikan nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah. Khusus untuk pendidikan agama dan keagamaan telah diatur dalam peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.⁵

³ Suhadi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang*, thesis UNNES 2015, 9

⁴ Zusba Muctar, Syarifuddin Ondeng, dkk. *Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatibi Bontoabaddo Gowa*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 04, No. 3, 2016, 582.

⁵ Ahmad Darlis, *Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal*, Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, 2017, 91.

Sebagian besar pondok pesantren yang ada di Indonesia menggunakan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Terlebih lagi pesantren salafiyah yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal didalamnya, maka tidak mendapatkan dana operasional dari pemerintah, jadi pesantren salafiyah harus secara mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri, mulai dari mencari sumber dana, pengelolaan dana, hingga pengawasan serta evaluasi dana yang digunakan. Pesantren yang memiliki santri mukim didalamnya, sebenarnya memerlukan dana yang besar, mulai dari pembelajaran madrasah, urusan dapur, hingga dana operasional asrama, dan lain sebagainya,. Maka pendaan merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan pembelajaran di pondok pesantren termasuk juga pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Babadan Ponorogo.

Dalam mengurus suatu Lembaga Pendidikan ataupun pesantren apabila dana tersedia maka akan lebih mudah untuk mengelolanya. Untuk mendapatkan dana sejumlah yang diperlukan untuk pengelolaan pesantren maka harus ada sumber dana yang memadai. Pada umumnya Lembaga Pendidikan memiliki sumber dana dari pemerintah dan sumber dana dari non pemerintah. Dikarenakan pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan adalah pesantren berbasis salafiyah dan tidak mendapatkan dana dari pemerintah, jadi pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan dengan mandiri mencari sumber dana untuk pengelolaan pesantren.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul penelitian "Manajemen Pembiayaan dalam meningkatkan sumber dana di pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan Babadan Ponorogo". Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) dari mana saja sumber dana di pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan?, (2) bagaimana alokasi pembiayaan dan perencanaan anggaran pembiayaan di pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari mana saja sumber dana pembiayaan di pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan dan mengetahui untuk apa saja alokasi dana serta perencanaan anggarannya. Harapan peneliti dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan untuk manajemen pesantren kedepannya terlebih lagi manajemen pembiayaan pesantren.

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif studi kasus. Studi kasus

⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014)141-159)

merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus akan menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk membangun sebuah teori.⁷ Penggunaan metode dan pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh data secara mendalam mengenai manajemen pembiayaan di PPTQ Al-Hasan Ponorogo.

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka maupun orang. Adapun objek penelitian adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁸ Sumber data pada penelitian ini adalah dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pembiayaan PPTQ Al-Hasan, dokumentasi dan observasi.

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan data pada saat penelitian. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁹ Untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok pesantren tahfidzul Qur'an Al-Hasan merupakan pesantren Al-Qur'an berbasis salaf. Didalamnya tidak terdapat Lembaga formal melainkan hanya ada Lembaga nonformal berupa madrasah diniyah. Maka pondok Al-Hasan tidak mendapatkan bantuan tetap dari pemerintah, jadi harus secara mandiri memenuhi kebutuhannya mulai dari pengeluaran operasional berupa kebutuhan untuk pembelajaran di madrasah, gaji guru, biaya listrik dan air, pemenuhan kebutuhan untuk makan santri, biaya kerusakan fasilitas maupun gedung pondok, dan keperluan lainnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan untuk pengeluaran modal seperti pembangunan Gedung pesantren, pembelian fasilitas pesantren, maupun beli lahan atau tanah untuk perluasan wilayah pesantren.

Dengan banyaknya kebutuhan tersebut maka pondok Al-Hasan memiliki kebijakan untuk mencari dana guna memenuhi semua keperluan yang harus dipenuhi. Sumber dana utama di pondok Al-Hasan adalah berasal dari wali santri dan masyarakat. Dana dari wali santri yakni

⁷ Ibid.,

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 151.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62-63.

berupa sejumlah biaya bulanan yang harus dibayarkan santri ke pondok setiap bulannya yang terdiri dari biaya SPP dan syahriyah. Yang SPP sepenuhnya untuk biaya operasional pesantren, sedangkan uang syahriyah sepenuhnya untuk biaya makan santri selama satu bulan. Proses pelaksanaan biaya bulanan ini yakni santri atau wali santri dengan membawa kartu yang sudah dibagikan sebelumnya langsung membayar ke pengurus bendahara. Pengurus bendahara inilah yang membantu pengasuh mengatur dan mengurus keuangan pondok pesantren. Selain itu pengurus bendahara juga keliling setiap kamar untuk menagih biaya bulanan (SPP dan syahriyah), biasa pengurus bendahara keliling kamar setiap tanggal 10 pada setiap bulannya.

Selain biaya bulanan yang harus dikeluarkan wali santri/santri setiap bulannya, ada juga tarikan tahunan berupa jariyah wajib. Jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk jariyah wajib ialah sejumlah RP. 100.000,- per santri. Untuk pembayarannya diberikan ke pengurus sekretaris sesuai hasil kebijakan ketika musyawarah pengurus dan pengasuh di awal tahun. Khusus untuk tagihan tahunan ini bisa dicicil selama 3 bulan maksimal, mengingat santri di pondok Al-Hasan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kemudian ada juga tarikan dadakan yang harus dikeluarkan santri pada momen tertentu. Seperti ketika mengadakan acara perayaan hari besar islam dan akhirussanah madrasah diniyah (yakni kegiatan semacam perpisahan di sekolah) yang dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran. Untuk tarikan dadakan seperti ini biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak kisaran RP. 5000,- sampai RP. 10.000,- setiap acaranya. Tarikan dadakan ini biasanya dibayarkan langsung ke panitia acara yang mengadakan, guna adanya tarikan dadakan ini untuk biaya konsumsi dan pelaksanaan kegiatan acara. Untuk acara khotmil qur'an yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, biayanya berasal dari peserta khotmil dan non khotmil ditambah dana donator dari masyarakat.

Sumber dana selanjutnya adalah berasal dari masyarakat. Untuk sumber dana dari masyarakat ini tidak menentu jumlah dan waktunya. Ada yang datang ketika pihak pondok mencari donator, ada juga masyarakat yang datang langsung ke pondok untuk memberikan sejumlah dana. Bantuan dana dari masyarakat bias dari masyarakat sekitar pondok yang memang antusias untuk ikut memajukan pondok pesantren, terdapat juga dari alumni pondok, atau toko bangunan sekitar Ponorogo. Ada juga dana yang ada ketika pihak pondok menyebarkan proposal bantuan untuk pembangunan pondok maupun acara wisuda khotmil qur'an. Biasanya pihak panitia menyebar ke berbagai tempat di Ponorogo untuk mencari dermawan yang mau menjadi donator untuk pondok Al-Hasan. Selain kedua sumber dana yang telah disebutkan pernah sesekali pondok Al-Hasan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan kamar mandi dan WC pondok. Berdasarkan penjelasan tersebut maka

dapat diketahui bahwa sumber dana utama di pondok Al-Hasan adalah dari wali santri yang masyarakat. Untuk sumber dana dari pemerintah hanya sesekali saja.

Dari beberapa sumber dana yang sudah disebutkan, selanjutnya adalah mengalokasikan dana yang telah diperoleh. Untuk dana yang berasal dari wali santri/santri setiap bulannya adalah untuk biaya operasional pesantren dan uang makan santri. Untuk santri putra dan putri berbeda jumlah biaya yang harus diserahkan setiap bulannya. Santri putra membayar RP 100.000,- per bulan untuk biaya SPP pondok, jadi untuk santri putra tidak ada fasilitas kos makan dari pondok. Berbeda dengan santri putri yang wajib membayar uang SPP sebesar RP 100.000,- dan uang syahriyah sebesar RP 350.000,- untuk biaya makan santri putri. Untuk uang syahriyah sepenuhnya langsung diserahkan oleh pengurus bendahara ke pengasuh, karena dari pihak pengasuh yang membelanjakan sendiri untuk kebutuhan dapur pondok. Berbeda untuk uang SPP, pengurus bendahara putra dan putri menyisihkan 20 persen dari setiap setoran bulanan yang serahkan ke pengasuh. Karena untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan yang tidak terduga dan perlu cepat diselesaikan. Hal itu dimaksudkan agar pengurus bendahara tidak terlalu sering sowan atau bertemu pengasuh meminta biaya untuk keperluan. Pondok Al-Hasan masih kental akan sisi salafiyahnya, jadi santri tidak memiliki keberanian untuk terlalu sering sowan dan merepotkan pihak pengasuh apabila ada masalah yang bias diselesaikan oleh pihak pengurus sendiri, maka tidak perlu dilaporkan ke pengasuh. Uang SPP yang dibayarkan santri adalah untuk keperluan pengelolaan pondok. Biasanya untuk pembelian peralatan dapur, kebutuhan pembelajaran madrasah, perbaikan lampu atau pipa rusak, dan keperluan kecil pondok lainnya.

Keperluan dalam pemenuhan pondok itu besar dan banyak, selain keperluan yang sudah disebutkan ada juga keperluan besar yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan gedung baru. Untuk pembangunan gedung pondok tentunya membutuhkan biaya besar. Maka dana yang berasal dari tagihan tahunan wajib itu semuanya dialokasikan untuk pembangunan gedung. Dana itu dibayarkan setiap tahunnya oleh para santri baik ada pembangunan gedung baru maupun tidak, dimana nantinya uang ditabung dan diambil ketika dibutuhkan. Untuk mengurus hal itu ada kerjasama antara pihak pengasuh, pengurus pondok dan panitia pembangunan. Selain itu, sisa dari uang SPP juga dialokasikan untuk pembangunan gedung.

Pondok pesantren kebanyakan untuk system pembiayaanya langsung dikelola oleh pihak pengasuh, begitu pula pondok Al-Hasan. Dimana model manajemennya masih tradisional dan tidak tertulis secara rinci sebagaimana model pembiayaan pada lembaga formal. Jadi untuk

konsep transparansi di Lembaga pesantren sedikit berbeda dengan konsep transparansi di Lembaga formal. Di Al-Hasan pihak pengurus menyampaikan secara lisan tentang biaya yang dikeluarkan dan dibutuhkan kepada pihak bendahara maupun panitia secara garis besarnya ketika musyawarah. Untuk biaya bulanan tidak ada rencana anggaran tertulis. Namun untuk kegiatan acara, wisuda khotmil qur'an dan ketika pembangunan gedung baru ada rancangan tertulis yang diurus oleh pihak panitia.

KESIMPULAN

Sumber dana pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan berasal dari wali santri dan masyarakat serta sesekali ada bantuan dari pemerintah. Untuk dana dari wali santri/santri ini merupakan sumber dana yang utama dari pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan. Sedangkan dana dari masyarakat bias dari masyarakat sekitar pondok, alumni, toko bangunan sekitar Ponorogo, maupun dermawan yang langsung datang ke pondok untuk memberikan bantuan.

Alokasi dana dari santri atau wali santri adalah untuk biaya operasional pondok dan biaya makan santri setiap bulannya. Dan apabila terdapat sisa dialokasikan untuk keperluan lainnya seperti pembangunan gedung baru. Sedangkan sumber dana dari masyarakat langsung dialokasikan sesuai ijab dari donatur. Apabila ada masyarakat yang memberikan bantuan untuk pembangunan gedung baru, maka dana dialokasikan untuk pembangunan gedung baru. Namun apabila donator bermaksud membantu untuk kegiatan acara pondok, maka dana dialokasikan untuk keperluan acara. Kemudian untuk rancangan biaya, tidak ada rancangan tertulis untuk mengalokasikan dana bulanan dari santri. Sedangkan apabila untuk acara atau keperluan pembangunan gedung acara rancangan anggaran tertulis yang diurus oleh panitia dan dipantau oleh pengasuh.

Terkadang terdapat kendala dalam mengurus biaya antara panitia, pengurus dan pengasuh dikarenakan kurangnya komunikasi. Maka saran penulis adalah untuk lebih meningkatkan komunikasi antara semua pihak, namun tetap menggunakan etika yang baik agar tetap sopan dihadapan pengasuh. Selain itu perlu adanya pembaharuan orang-orang yang dilibatkan dalam urusan besar pondok, agar ada generasi baru yang terus membantu dan menganbdi untuk pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Hasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Arifin, Miftahol. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal STIT Al-Karimiyyah Sumenep*.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo, dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: IKAPIJABAR, 2017.
- Darlis, Ahmad. *Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal*, Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, 2017.
- Fatah, Nanang. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fauzi, Ahmad. Manajemen dana dan sumber dana pondok pesantren, jurnal Tasyri', vol. 24, no. 1, 2017.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Muctar, Zusba. Syarifuddin Ondeng, dkk. *Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatibi Bontoabaddo Gowa*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 04, No. 3, 2016.
- Sakti, Andhika dan Ara Hidayat. *Manajemen Sumber Dana Dan Alokasi Pembiayaan Pada Pesantren Mahasiswa*, Jurnal Perspektif, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Skripsi <http://repository.unimus.ac.id/804/3/BAB%20II.pdf>.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005
- Suhadi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pematang*, thesis UNNES 2015.
- Suharjono, *Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren*, Jurnal Ekuilibrium, no. 2, vol. 8, 2019.
- Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.